Qurthuba: The Journal History and Islamic Civilization
Volume 10, Issue 1, September 2026
ISSN: 2621-1459 [Online]; 2620-374X [Printed]

Dampak Perjanjian Politik Antara Pakubuwana VI dan Pemerintah Inggris terhadap Kasunanan Surakarta Tahun 1830 M

Iin Nur Zulaili
UIN Sunan Ampel Surabaya
Corresponding author: iin.nur.zulaili@uinsa.ac.id
Iffah Nur Azizah
UIN Sunan Ampel Surabaya
03030223108@uinsa.ac.id
Abdurrahman Ad Dakhil
Universitas Indonesia
abdurrahman.ad@ui.ac.id

https://doi.org/10.15642/qurthuba.2026.10.1.71-84

Received: 01 July 2026; Accepted: 5 September 2026; Published: 30 September 2026

Abstract: *This study aims to analyze the political and social impacts of the 1830 political agreement between Pakubuwana VI and England Goverment on the Surakarta Kasunanan. It seeks to place this event within the broader context of Javanese resistance against Dutch colonial rule during the Java War (1825–1830). The research applies the historical method through four main stages: heuristics, verification, interpretation, and historiography. Primary sources include manuscripts of agreements between Pakubuwana VI and the England Goverment, supported by secondary literature relevant to Javanese political history. Findings reveal that the political agreement between Pakubuwana VI and England Goverment was not merely symbolic but represented a form of inter-keraton solidarity in confronting colonial power. However, this alliance had significant repercussions for the Kasunanan of Surakarta, particularly in weakening its political authority and legitimacy after the war. The Colonial used the postwar situation to tighten their control by exiling Pakubuwana VI and limiting the Kasunanan's autonomy.The political agreement of 1830 marks a pivotal moment in the political transformation of Java, signifying the decline of traditional royal power and the rise of stronger colonial domination over the Kasunanan of Surakarta.*
Keywords: *Pakubuwana VI, England Goverment, Political Agreement, Surakarta.*

PENDAHULUAN

Dalam lima tahun terakhir penelitian tentang Pakubuwana VI belum banyak dilakukan. Data tertatas ditemukan penelitian Sukrismiyati tentang stategi politik militer Pakubuwana VI melawan kolonialisme Belanda tahun 1823-1830 yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa siasat seperti Mimis Kencana, Candradimuka, dan pertemuan-pertemuan rahasia dan perang Gerilya untuk membantu Pangeran Diponegoro. Dari perjanjian-perjanjian tersebut banyak yang merugikan pihak keraton sendiri termasuk

How to cite: Zulaili, I. N., Azizah, I. N., dan Dakhil, A. A., "Dampak Perjanjian Politik Antara Pakubuwana VI dan Pemerintah Inggris terhadap Kasunanan Surakarta Tahun 1830 M," *Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization*, Vol. 10, No. 1, (September 2026): 71–84. DOI: https://doi.org/10.15642/qurthuba.2026.10.1.71-84

pada pembatasan kekuasan Pakubuwana VI sampai pada diasingkannya beliau ke Ambon pada 8 Juli 1830.[1]

Kemudian, penelitian Meideri dan Prakoso yang menafsirkan Perang Diponegoro sebagai bentuk "*total war*" yang melibatkan aspek sosial, religius, dan politik istana, bukan sekadar konflik militer.[2] Selain itu, Wiryawan juga meneliti bahwa keraton Surakarta memainkan peran simbolik penting dalam membentuk legitimasi politik kolonial setelah perang Jawa usai.[3] Penelitian paling mutakhir oleh Nugroho yang mengkaji hegemoni patriarkal dalam kekuasaan raja-raja Jawa melalui teks *Wulang Putri*, menyingkap proses internalisasi nilai kekuasaan keraton yang semakin subordinatif terhadap kepentingan kolonial.[4]

Namun demikian, literatur-literatur tersebut masih belum menyinggung secara spesifik perjanjian politik antara Pakubuwana VI dan Pemerintah Inggris, terutama terkait *bagaimana dampak perjanjian itu mengubah struktur politik, legitimasi simbolik, serta hubungan internal-eksternal Kasunanan Surakarta.* Sebagian penelitian bahkan jarang menyebutkan tentang Pakubuwana VI, di dalam penelitian Verdy menyebutkan tentang Pakubuwana IV yang berperan mendukung aktivitas keagamaan di keraton.[5] Dalam hal inilah yang menimbulkan kesenjangan penelitian (research gap) yang hendak dijembatani dalam artikel ini yakni dengan menganalisis posisi perjanjian politik tersebut sebagai *turning point* dalam transformasi politik Kasunanan terkhusus Pakubuwana VI.

Jika menilik sejarah politik Jawa pada akhir abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19 sangat diwarnai oleh dinamika hubungan antara kerajaan-kerajaan Jawa dengan kekuatan kolonial Eropa. Pakubuwana VI yang pada saat itu harus menghadapi Belanda Kembali setelah Inggris menyerahkan kembali Jawa kepada mereka pada 1816.[6] Sunan Pakubuwana VI dikenal berusaha mendukung Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa

[1] Sukrismiyati, Tri Yuniyanto, Djono, *Strategi Politik Pakubuwana VI Melawan Kolonial Belanda Tahun 1823 – 1830*, (Jurnal Candi Vol. 12. No 2, Oktober 2015), 138.

[2] Akhiyar Meideri dan Lukman Yudho Prakoso, "Diponegoro War History in Total War Perspective in Supporting Strategies the National Defense," *IJRISS* 5, no. 4 (2021), 325.

[3] G. Wiryawan, "Keraton Surakarta dan Legitimasi Politik Kolonial Pasca Perang Jawa," *Paramita: Historical Studies Journal* 30, no. 1 (2020), 67.

[4] Yusro Edy Nugroho, Sahid Teguh Widodo, Wasino, dan Pardi, "Patriarchal Hegemony of Javanese Kings Power in Wulang Putri Text," Cogent Arts & Humanities 11, no. 1 (2024): 6-7. https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2335778

[5] Verdy Firmantoro, "Membaca Komunikasi Politik Pangeran Diponegoro (Studi Eksploratif Perspektif non-Western dalam Praktik Komunikasi Politik Pangeran Diponegoro Abad XVIII-XIX)" (Tesis Magister, Universitas Brawijaya, 2018), 185.

[6] Peter Carey, Farish A. Noor. *Ras, Kuasa, dan Kekerasan Kolonial di Hindia Belanda 1808–1830*. (Jakarta: Gramedia, 2022), 187.

(1825–1830), sehingga posisi dan perjanjian yang dibuatnya dengan Belanda sarat dengan intrik, tekanan, bahkan berakhir pada penyingkiran dirinya dari takhta. Kajian ini bertujuan menelusuri *konteks politik Kasunanan Surakarta sebelum masa Pakubuwana VI, menelaah peran ganda Pakubuwana VI sebagai raja dan aktor politik perlawanan, serta mengidentifikasi dampak perjanjian politiknya dengan Pemerintah Inggris terhadap Kasunanan Surakarta tahun 1830*

Berdasarkan kesenjangan tersebut, rumusan masalah yang dikaji ialah: *Bagaimana kondisi politik dan sosial Kasunanan Surakarta sebelum masa Pakubuwana VI; bagaimana peran ganda Pakubuwana VI dalam menjembatani dua kekuatan, kolonial Belanda dan gerakan Diponegoro; serta bagaimana dampak perjanjian politik 1830 terhadap struktur kekuasaan, legitimasi, dan arah politik Kasunanan Surakarta?* Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kondisi Jawa dan Kasunanan Surakarta sebelum masa pemerintahan Pakubuwana VI, untuk memahami konteks sosial-politik awal abad ke-19, menganalisis peran ganda Pakubuwana VI sebagai raja sekaligus tokoh politik yang berhadapan dengan dilema loyalitas antara kolonial dan gerakan Diponegoro, dan menguraikan dampak perjanjian politik antara Pakubuwana VI dengan Pemerintah Inggris tahun 1830 terhadap posisi dan kekuasaan Kasunanan Surakarta Hadiningrat, baik secara politik, administratif, maupun simbolik.

Konteks penelitian ini mencakup wilayah Jawa Tengah bagian selatan, khususnya Surakarta dan daerah mancanegara keraton, dengan unit analisis utama berupa institusi Kasunanan Surakarta sebagai entitas politik-kultural serta figur Pakubuwana VI sebagai aktor sejarah. Pendekatan yang digunakan adalah analisis historis-kritis, menelusuri sumber arsip kolonial, babad Jawa, dan studi historiografi modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yaitu cara untuk meneliti dan menulis peristiwa masa lalu secara sistematis berdasarkan sumber-sumber yang dapat dipercaya. Metode ini membantu penulis untuk memahami bagaimana peristiwa perjanjian politik antara Pakubuwana VI dan Pemerintah Inggris pada tahun 1830 memengaruhi keadaan politik Kasunanan Surakarta. Proses penelitian ini dilakukan melalui empat tahap utama, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Tahap pertama adalah heuristik, yaitu tahap mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Pada tahap ini, penulis menelusuri berbagai sumber yang berhubungan dengan masa pemerintahan Pakubuwana

VI dan kondisi politik Jawa setelah Perang Diponegoro. Tahap kedua adalah verifikasi, yaitu tahap untuk memeriksa keaslian dan kebenaran sumber yang telah ditemukan. Tidak semua dokumen sejarah bisa langsung dipercaya, karena beberapa mungkin mengalami perubahan atau ditulis dengan sudut pandang tertentu. Tahap ketiga adalah interpretasi, yaitu tahap menafsirkan atau memahami makna dari sumber-sumber yang telah diverifikasi. Dalam tahap ini, penulis mencoba menjelaskan hubungan antara peristiwa perjanjian politik dengan dampaknya terhadap Kasunanan Surakarta. Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu tahap penulisan sejarah menggunakan Bahasa yang baik dan mudah dimengerti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Sosial Politik Jawa Awal Abad ke-19

Pada masa pemerintahan Pakubuwana IV (1788–1820), Kasunanan Surakarta mengalami masa yang penuh ketegangan politik dan tekanan kolonial. Beliau, yang bernama kecil Raden Mas Subadya, naik takhta menggantikan ayahandanya, Pakubuwana III, dan dikenal sebagai raja yang saleh, cerdas, serta memiliki perhatian besar terhadap pendidikan dan ajaran Islam. Salah satu warisan intelektualnya yang terkenal adalah *Serat Wulang Reh*, karya sastra yang berisi ajaran moral dan spiritual bagi masyarakat Jawa[7]. Namun, pemerintahan Pakubuwana IV tidak luput dari gejolak politik. Pihak Belanda curiga terhadap kedekatannya dengan ulama dan bangsawan anti-kolonial, sehingga pada masa pemerintahannya terjadi peristiwa *Pakepung* yang menjadi simbol kuatnya intervensi kolonial dalam urusan kerajaan. Di sisi lain, muncul pula peristiwa *Geger Sepoy*, kerusuhan yang melibatkan pasukan bayaran asal India Selatan (Sepoy) yang dipekerjakan Belanda dan menimbulkan kekacauan di wilayah Surakarta.[8] Dua peristiwa ini menunjukkan semakin lemahnya kedaulatan politik Kasunanan di bawah tekanan kolonial, sekaligus menjadi awal dari perubahan besar dalam struktur kekuasaan Jawa menuju masa pemerintahan Pakubuwana V dan VI, di mana kontrol Belanda atas istana semakin mutlak.

[7] Sabar Narimo. "Konsepsi Nilai Nilai Pendidikan Humanis-Religius Menurut Pakoe Boewono Iv (1788-1820) Dalam Serat Wulang-Reh". Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol. 15, No. 2, Desember 2014: 175-189.

[8] Peter Carey, Farish A. Noor. *Ras, Kuasa, dan Kekerasan Kolonial di Hindia Belanda 1808–1830*, 195.

Pakubuwana VI atau Bendara Raden Mas Sapardan merupakan putra kesebelas dari Susuhunan Pakubuwana V. Ia lahir pada hari Ahad Wage, 18 Sapar tahun Je 1734, yang bertepatan dengan tanggal 26 April 1807. Ibunya bernama Raden Ayu Sosrokusumo.[9] Ia tumbuh di lingkungan keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, pusat budaya dan politik Jawa yang masih mempertahankan warisan Mataram Islam. Sejak kecil, Raden Mas Sapardan dididik dalam tradisi keislaman yang kuat, dengan bimbingan guru-guru agama dan ulama istana, serta diajarkan nilai-nilai kepemimpinan, etika priyayi, dan sastra klasik Jawa. Ia memperoleh bimbingan dari para sesepuh istana, di antaranya Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi (putra Pakubuwana III), Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Buminata (putra Pakubuwana III), Kanjeng Pangeran Hadinegara (putra Pakubuwana III), serta Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Kusumoyuda (putra Pakubuwana IV sekaligus pamannya). Selain itu, beliau juga diasuh oleh Kanjeng Raden Adipati Sasradiningrat II, yang saat itu menjabat sebagai patih kerajaan. Melalui bimbingan dan pengasuhan tersebut, jiwa patriotik mulai tumbuh kuat dalam diri Raden Mas Sapardan.[10]

Raden Mas Sapardan dinobatkan menjadi Sri Susuhunan Paku Buwana VI, sebagai pengganti ayahnya pada hari Senin Kliwon, 9 Suro tahun Dal1751 atau tanggal 15 September 1823.[11] Penobatannya mendapat pengesahan resmi dari Gubernur Jenderal Belanda di Batavia sebagai bentuk legitimasi kekuasaan kolonial. Sejak awal masa pemerintahannya, ia mewarisi kerajaan yang sudah rapuh secara politik maupun ekonomi. Struktur pemerintahan Kasunanan saat itu berada di bawah kendali penuh pemerintah Hindia Belanda, dengan residen Belanda berperan sebagai otoritas tertinggi dalam urusan kerajaan.

Pakubuwana VI berupaya memulihkan kehormatan dan kewibawaan kerajaan dengan memperkuat kehidupan agama serta moral masyarakat. Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan pentingnya menegakkan nilai-nilai Islam dan keadilan sosial sebagai dasar kehidupan bernegara. Di sisi lain, sikap keagamaannya yang kuat dan simpatinya terhadap gerakan Islam tradisional membuat pemerintah kolonial curiga. Hubungannya dengan Pangeran Diponegoro yang sedang memimpin perlawanan di

[9] Sukrismiyati, Tri Yuniyanto, Djono, *Strategi Politik Pakubuwana VI Melawan Kolonial Belanda Tahun 1823 – 1830*, (Jurnal Candi Vol. 12. No 2, Oktober 2015), 139.

[10] Suratmin, Paku Buwana VI. (Jakarta: Proyek IDSN, Depdikbud, 1982), 7.

[11] D.R. Nurhajarini, Tugas Triwahyono, Restu Gunawan. Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Rl (1999), 106.

Yogyakarta memperburuk posisi politiknya. Pakubuwana VI dituduh diam-diam memberikan dukungan moral dan logistik kepada pasukan Diponegoro, meskipun hal ini tidak pernah terbukti secara hukum.

Melalui perjanjian politik 1830 (yang akan dibahas) yang diwakili oleh Komisioner Merkus dan Naus, Belanda berhasil menekan Kasunanan Surakarta agar menyerahkan tanah, mengubah struktur pemerintahan, dan menerima pengawasan langsung kolonial. Namun di balik perjanjian tersebut, tersimpan makna penyingkiran politik terhadap raja. Tak lama setelah penandatanganan perjanjian itu, Pakubuwana VI ditangkap dan dibuang ke Ambon pada tahun 1830, di mana ia kemudian wafat pada 1849. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Pakubuana VI pernah melakukan peran ganda yaitu sebagai pendukung Belanda dan juga mendukung Pangeran Diponegoro (anak Hamengkubuana III) dalam perlawanan melawan Belanda. Menjelang penghujung tahun 1829, Perang Diponegoro yang merupakan sebuah perlawanan terhadap Belanda sudah hampir mencapai titik akhir. Hanya segelintir pemimpin yang tetap setia kepada Pangeran Diponegoro dan perlahan mundur ke daerah pegunungan, tempat mereka bertahan hingga akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap di Magelang pada 28 Maret 1830.[12]

Dalam Perjuangannya, Pakubuwana VI selalu berjalan beriringan dengan Pangeran Diponegoro, tetapi masing-masing mempunyai alasan sendiri-sendiri dalam menghadapi penjajah.[13] Keduanya saling bantu-membantu walaupun mempunyai tujuan masing-masing. Disamping itu dalam perjuangan keduanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, keduanya sepakat untuk mentaati perjanjian yang telah ditetapkan. Isi dari perundingannya antara lain:

1. Ingkang Sinuhun Pakubuwana VI jika memberikan bantuan kepada Pangeran Diponegoro tidak perlu dilakukan secara terang-terangan dalam artian dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi.
2. Ingkang Sinuhun Pakubuwana VI memberikan bantuan kepada Pangeran Diponegoro baik dalam wujud makanan maupun harta
3. Susuhunan Pakubuwana VI tetap memberikan bantuan kepada Belanda sesuai dengan perjanjian tahun 1749, hal ini dilakukan dengan tujuan agar lebih mudah

[12] Peter Carey dkk, *Babad Diponegoro Sebuah Hidup yang Ditakdirkan* (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2025), 236.

[13] Radjiman. *Sejarah Mataram Kartasura Sampai Surakarta Hadiningrat*. (Surakarta: Toko Buku Rodra, 1984), 77.

dalam mengetahui rencana maupun gerak-gerik Belanda, di samping itu juga memudahkan kewajiban para mata-mata atau telik sandi.

4. Karena musuh mempunyai peralatan yang lebih modern, maka peperangan melawan Belanda dilakukan dengn jalan perang Gerilya .
5. Jika dalam perkembangannya terjadi perubahan dalam hal politik maupun militer, maka perlu dilakukan pertemuan dan perundingan lagi [14].

Tetapi Pangeran Diponegoro berhasil ditaklukkan oleh Belanda pada tanggal 28 Maret 1830 saat ia ditangkap oleh Jenderal de Kock dalam sebuah perundingan di Magelang, yang sekaligus menandai akhir dari Perang Diponegoro. Perang ini berlangsung selama lima tahun, dari tahun 1825 hingga 1830. Belanda yang sejak awal berkeinginan menghapus sepenuhnya kekuasaan para penguasa Jawa segera mengadakan perundingan guna menetapkan status baru bagi kedua kerajaan di Jawa. Pertemuan antara Belanda, Surakarta, dan Yogyakarta tersebut dijalankan oleh sebuah komisi pemerintah yang beranggotakan tiga orang khusus ditugaskan untuk menangani hal itu, yakni P. Merkus,[15] J.I. van Sevenhoven, dan H.G. Nahuys van Burgst.[16]

Beberapa perundingan dilakukan antara pihak Belanda dengan Pakubuwana VI dengan tujuan untuk mencari jalan penyelesaian masalah. Perundingan resmi pertama dilakukan pada 12 Mei 1830. Dalam perundingan tersebut mengusulkan mengenai penyerahan daerah di sebelah Barat dan Timur Surakarta kepada Belanda dan sebagai imbalannya pajak atas daerah tersebut diserahkan kepada Surakarta. Selain itu Belanda juga meyakinkan akas terus membarikan dukunagan secara financial kepada para Pangeran dan menghapuskan seluruh kondisi yang mengakibatkan Perang Jawa. Pihak Pakubuwana VI mengajukan permintaan bahwa bagia tiap-tiap Bupati dari setiap daerah diizinkan untuk mengunjungi keraton setiap tahunnya untuk melakukan penghormatan kepada Sunan. Usulan dari Pakubuwana VI ditolak oleh pihak Belanda yang

[14] Yosodipuro. 1980. Sejarah Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwana VI Pahlawan Kemerdekaan Republik Indonesia. Surakarta: Sasana Pustaka.

[15] Pieter Merkus (18 Maret 1787–2 Agustus 1844) adalah Gubernur-Jenderal Hindia Belanda yang ke 47. Ia memerintah antara tahun 1841-1844.

[16] H.G. Nahuys van Burgst (Huibert Gerard Nahuys van Burgst, 1782–1858) adalah seorang Residen Belanda di Surakarta dan Yogyakarta, yang dikenal karena memoarnya tentang Perang Jawa (1825–1830). Ia menjabat sebagai Residen Belanda di Surakarta dan Yogyakarta dari tahun 1818 hingga 1822 dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Sultan Hamengkubuwono IV dalam Ahmad Syahid, "Islam and H. G. Nahuys' Memoirs on the Java War 1825-1830" Studia Islamika Jurnal, Vol. 27, no.3 (2020).Sukrismiyati, Djono Tri Yuniyanto, "Strategi Politik Pakubuwana Vi Melawan Kolonial Belanda Tahun 1823 – 1830" Jurnal CANDI Vol. 12. No 2, Oktober 2015, 144.

menimbulkan kekecewaan di pihak Kasunanan. Pada Tanggal 26 Mei 1830[17], Pakubuwana VI memberikan persetujuan atas usulan Belanda tersebut dengan syarat tetap mempertahankan tradisi penghormatan tahunan oleh Bupati mancanegara.

Dampak Perjanjian Politik terhadap Kasunanan Surakarta Tahun 1830

Perjanjian politik antara Pakubuwana VI dan Pemerintah Inggris pada tahun 1830 merupakan salah satu episode penting dalam sejarah politik Jawa. Perjanjian ini terjadi di tengah situasi genting pasca berakhirnya Perang Jawa (1825–1830) yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro melawan kekuasaan kolonial Belanda. Dalam konteks sejarah, peristiwa ini bukan hanya bentuk hubungan politik antar keraton, tetapi juga bagian dari proses panjang penundukan politik dan ekonomi kerajaan-kerajaan Jawa oleh kolonialisme Belanda. Melalui berbagai strategi perjanjian dan konsesi, pemerintah kolonial berusaha mengontrol sumber daya, birokrasi, serta kedaulatan simbolik raja-raja Jawa.

Naskah *Serat Dalem Ingkang Sinuhun Pakubuwono VI* menjadi salah satu bukti dokumenter penting dari praktik politik kolonial tersebut. Dalam surat kontrak tersebut, tersurat bagaimana pihak kolonial, melalui perantara pejabat tinggi seperti Rider Merkus dan Rider Naus, menegosiasikan sekaligus menekan pihak Kasunanan Surakarta agar menyerahkan sebagian wilayah, mengatur jabatan bupati, mengalihkan tanah warisan, dan bahkan mendanai pembangunan loji Belanda di Surakarta. Dari perjanjian inilah muncul sejumlah dampak yang sangat signifikan terhadap Kasunanan Surakarta. Berikut ini pembahasan mendalam mengenai dampak dari perjanjian tersebut.

Penyerahan Tanah di Pagelèn dan Mancanagari

> *"Punapa putra kula parêng amasrahakên tanah ing Pagêlèn ing Toyamas, sarta sapanunggilanipun, tanah ing măncanagari, dhumatêng ing Kangjêng Guphrêmèn…."*
> "Apakah anak saya bersedia menyerahkan tanah di Pagelen, Banyumas, dan sisa tanah di Mancanagari, kepada Kangjeng Guphremen…."

Pada bagian ini, terlihat jelas bahwa Belanda memberi tekanan kepada Pakubuwana VI untuk menyerahkan sebagian tanah milik kerajaan, seperti di Pagelèn,

[17] Naskah Perjanjian Pakubuwana VI dan Pangeran Diponegoro (1830).

Toyamas, dan Mancanagari. Tanah-tanah ini sebelumnya menjadi simbol kekuasaan raja, tempat kerajaan mengatur kehidupan rakyatnya, dan sumber penghasilan kerajaan. Dengan penyerahan tanah ini, posisi raja mulai melemah karena Belanda memegang kendali administratif atas wilayah tersebut. Meskipun Pakubuwana VI tetap diakui sebagai raja, kenyataannya keputusan besar tentang wilayah kekuasaan tidak lagi berada sepenuhnya di tangannya. Hal ini menandai awal dari berkurangnya kedaulatan kerajaan, di mana raja harus patuh pada perintah pemerintah kolonial agar tetap dianggap sah sebagai pemimpin.

Pengaturan Jabatan Bupati dan Loyalitas Politik

> *"...kangjêng guprêmèn badhe anggalih, ingkang dados panêdhanipun putra kula, bab pangangkating bopati..."*
> ""…Kanjeng Gubernur akan mempertimbangkan apa yang menjadi permintaan putra saya mengenai pengangkatan bupati…."

Bagian ini menjelaskan bahwa setiap bupati yang ingin diangkat atau ingin menghadap raja harus mendapat persetujuan dari pihak Belanda. Artinya, Belanda mengatur siapa saja yang boleh menjadi pejabat daerah dan memantau loyalitas mereka. Sebelumnya, bupati adalah wakil raja yang setia dan mengatur daerah sesuai arahan kerajaan. Namun sekarang, mereka juga harus mematuhi Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa Kasunanan Surakarta mulai kehilangan kekuasaan sendiri. Raja yang dulunya memegang kontrol atas pejabat daerah, kini harus tunduk pada aturan kolonial. Dengan kata lain, bupati menjadi alat kontrol Belanda, bukan hanya wakil raja. Hal ini membuat raja kehilangan sebagian besar kekuatan politiknya dan Kasunanan mulai menjadi bawahan administrasi kolonial.

Penetapan Warisan Tanah dan Keturunan

> *"...pitunanipun putra kula, saputra santananipun sadaya, punapamalih andadosakên ing pitunanipun siti dhusun kagunganipun kangjêng guphrêmèn."* "...harta warisan anak saya, semua keturunannya, diambil alih menjadi warisan tanah desa milik gubernur..."

Kutipan ini menunjukkan bahwa tanah dan harta warisan keluarga kerajaan yang seharusnya menjadi milik keturunan Pakubuwana VI akan berada di bawah kontrol Belanda. Hal ini memiliki dampak besar terhadap ekonomi dan kekuatan politik kerajaan.

Tanah dan harta tersebut bukan hanya untuk kehidupan sehari-hari, tetapi juga simbol kekuasaan raja. Ketika tanah-tanah itu diambil alih pemerintah kolonial, Kasunanan Surakarta kehilangan fondasi material yang membuatnya bisa berkuasa secara mandiri. Kehilangan harta ini juga membuat kerajaan semakin tergantung pada Belanda, karena semua keputusan penting tentang tanah dan sumber kekayaan harus melalui persetujuan pemerintah kolonial. Ini menandai awal dari kerugian ekonomi dan politik Kasunanan, yang semakin membuat raja dan keluarga kerajaan tidak berdaya di bawah tekanan kolonial.

Pembangunan Loji (Kantor Kolonial) di Surakarta

> *"Putra kula Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan, kula lêpatakên ing wajibipun anyaèni loji ing Surakarta, ing Kalathèn ing Bayalali, punika saupami sami kadandosan wragadipun langkung saking 100.000 rupiyah, kalihdene malih kula sami aprajangji, amranata sakathahing sambutanipun putra kula, saputra santananipun sadaya,, kalih putra kula…"*
> "Anakku yang Mulia Kangjeng Susuhunan, aku titipkan tugas untuk membangun pondok/rumah di Surakarta, di Kalathen, di Bayalali, biaya uangnya lebih dari 100.000 rupiah, kami berdua berjanji, termasuk segala ucapan sambutan anakku, semuanya anak keturunannya, juga putraku"

Bagian terakhir ini menjelaskan kewajiban Pakubuwana VI untuk membangun loji atau kantor Belanda di beberapa wilayah, seperti Surakarta, Kalathèn, dan Bayalali. Biaya yang harus dikeluarkan sangat besar, lebih dari 100.000 rupiah, yang saat itu merupakan jumlah yang sangat banyak. Loji ini bukan sekadar bangunan biasa, tapi simbol pengawasan Belanda terhadap kerajaan. Dengan adanya loji, Belanda bisa mengawasi aktivitas kerajaan, mengontrol rakyat, dan memastikan raja patuh pada aturan kolonial. Kehadiran loji juga membuat kekuasaan simbolik raja menjadi lemah, karena rakyat dan pejabat daerah kini juga harus melihat Belanda sebagai pengawas dan pengendali. Hal ini menandai akhir dari kedaulatan politik Surakarta, di mana raja tetap dihormati sebagai simbol, tetapi keputusan besar sepenuhnya berada di tangan Belanda

Teks surat ini berjudul *Serat Pradjadjijan, Serat Dalem Ingkang Sinuhun Pakubuwono VI, dan Serat Dalem Ingkang Sinuhun VII.* Naskah ini berbentuk prosa dan memiliki Catalog ID 1746. Naskah tersebut diterbitkan di Semarang pada tahun 1830.

Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa dengan aksara Jawa. Naskah ini terdiri dari 65 halaman, dengan 4 halaman kosong, dan berukuran 32,4 x 20,5 cm, sedangkan ukuran teksnya 27 x 15,7 cm. Kondisi naskah masih baik, jilidannya utuh, dan ditulis bolak-balik menggunakan tinta hitam tebal di atas kertas HVS kecokelatan. Setiap halaman berisi 27 baris tulisan yang agak miring ke kanan. Nomor halaman menggunakan angka Arab, dimulai dari halaman daftar isi tanpa nomor, lalu dua halaman kosong, dilanjutkan halaman 1 sampai 65, dan diakhiri dua halaman kosong di bagian belakang. Tulisan dalam naskah ini mudah dibaca dan ditulis dari kiri ke kanan. Saat ini, naskah tersebut disimpan di Yayasan Sastra Lestari, Surakarta, Jawa Tengah, dan menjadi salah satu koleksi penting karya sastra keraton yang berhubungan dengan Pakubuwono VI dan VII.

Teks surat yang ditulis pada 26 Mei 1830 ini menggambarkan kondisi politik Jawa pasca-Perang Diponegoro, ketika kedudukan raja-raja Jawa, termasuk Susuhunan Pakubuwana VI, berada dalam tekanan kuat pemerintah kolonial Belanda. Surat tersebut, yang diawali dengan penyebutan Panglima Tertinggi Rider Merkus, Rider Naus, dan Susuhunan Pakubuwana VI, pada dasarnya bukan hanya sekadar komunikasi administratif, melainkan juga instrumen politik untuk menegaskan dominasi kolonial. Dari gaya bahasanya terlihat jelas adanya hubungan paternalistik: Belanda menempatkan dirinya sebagai “ayah bijak” sementara Susuhunan diperlakukan sebagai “anak” yang harus tunduk, suatu bentuk wacana yang secara halus menurunkan wibawa raja Jawa dari penguasa politik menjadi pihak yang dikendalikan.

Isi utama surat menyoroti masalah tanah warisan dan wilayah kekuasaan. Susuhunan diminta untuk menyerahkan tanah-tanah di Pagêlèn, Banyumas, dan beberapa wilayah Mancanagari kepada Gubernur. Secara formal hal ini ditampilkan sebagai permintaan atau aturan yang harus dipenuhi, tetapi secara substansial merupakan bentuk perampasan hak-hak feodal keluarga keraton. Tanah desa yang semula menjadi sumber kehidupan dan simbol otoritas keluarga raja dipaksa untuk dialihkan, sehingga Susuhunan tidak lagi berdaulat atas tanah dan rakyatnya. Dengan demikian, surat ini mencerminkan bagaimana Belanda berusaha melucuti basis ekonomi politik keraton demi memperkuat cengkeramannya.

Di samping itu, surat juga memuat tekanan psikologis terhadap Susuhunan. Ia diminta memberikan jawaban tegas dalam waktu hanya tiga hari, sebuah tenggat yang jelas mengandung ancaman tersirat: bila ia tidak segera menuruti permintaan, posisinya sebagai raja akan dianggap lemah, bahkan dapat digantikan. Tekanan semacam ini

memperlihatkan strategi kolonial yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga permainan administrasi dan manipulasi komunikasi resmi. Susuhunan dipaksa berada dalam dilema: mempertahankan warisan keluarga atau menyelamatkan posisinya dengan mengikuti kehendak Gubernur Jenderal.

Aspek lain yang menarik adalah penyebutan proyek pembangunan pondok atau rumah di Surakarta dengan biaya yang sangat besar, mencapai lebih dari 100.000 rupiah. Hal ini menandakan adanya jeratan ekonomi yang dipasang oleh Belanda. Susuhunan diarahkan untuk menanggung beban finansial yang justru membuatnya semakin bergantung pada bantuan dan pengaturan kolonial. Selain itu, proyek semacam ini juga memiliki makna simbolis, karena menyentuh kehidupan sehari-hari keraton dan memperlihatkan sejauh mana Belanda ikut campur tangan dalam urusan domestik istana.

KESIMPULAN

Surat bertanggal 26 Mei 1830 ini mencerminkan keadaan Susuhunan Pakubuwana VI yang berada di bawah kendali kuat pemerintah kolonial Belanda. Melalui bahasa yang penuh tekanan, surat tersebut menunjukkan upaya sistematis Belanda untuk menegaskan dominasi politik sekaligus melemahkan kedaulatan ekonomi keraton, khususnya melalui perampasan tanah-tanah warisan di Pagêlèn, Banyumas, dan wilayah Mancanagari. Permintaan penyerahan tanah, tenggat waktu tiga hari untuk memberikan jawaban, serta proyek pembangunan rumah di Surakarta yang membebani keuangan keraton, semuanya merupakan bagian dari strategi kolonial yang memadukan kekuatan administratif, ekonomi, dan psikologis untuk menundukkan Susuhunan. Dengan demikian, surat ini tidak hanya menjadi bukti komunikasi resmi, tetapi juga cermin nyata dari politik kolonial yang menekan otoritas Sunan saat itu.

SARAN

Harapannya, artikel ini bisa menjadi dasar atau acuan bagi peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian tentang kerja sama politik antara tokoh-tokoh Jawa dan pihak kolonial. Peran Pangeran Diponegoro dan Pakubuwana VI sangat besar, bukan hanya dalam perlawanan terhadap Belanda, tetapi juga dalam membentuk sistem pemerintahan di Jawa setelah perang. Dengan adanya penelitian lanjutan, diharapkan sejarah masa itu bisa dijelaskan dengan lebih sederhana, lengkap, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis khusus haturkan dengan bangga kepada Yayasan Sastra Lestari di Surakarta karena sudah bekerja keras mendigitalisasikan naskah dan mengalih aksarakan dengan begitu rapi dan teliti sehingga bisa dibaca dan diteliti oleh para peneliti dari berbagai daerah.

REFERENSI

Sumber Primer

Naskah Prajanjian Pakubuwana IV, Pakubuwana VI, dan Pakubuwana VII. Yayasan Sastra Lestari:Surakarta. www.sastra.org

Buku

Carey, Peter, dan Farish A. Noor. *Ras, Kuasa, dan Kekerasan Kolonial di Hindia Belanda 1808–1830.* Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2022.

Carey, Peter, dkk. *Babad Diponegoro: Sebuah Hidup yang Ditakdirkan.* Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), t.t.

Firmantoro, Verdy. "Membaca Komunikasi Politik Pangeran Diponegoro (Studi Eksploratif Perspektif non-Western dalam Praktik Komunikasi Politik Pangeran Diponegoro Abad XVIII-XIX)." Tesis Magister, Universitas Brawijaya, 2018.

Nurhajarini, D. R., Tugas Triwahyono, dan Restu Gunawan. *Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1999.

Radjiman. *Sejarah Mataram Kartasura Sampai Surakarta Hadiningrat.* Surakarta: Toko Buku Rodra, 1984.

Ricklefs, M. C. *Mengislamkan Jawa.* Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2012.

Suratmin. *Paku Buwana VI.* Jakarta: Proyek IDSN, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982.

Yosodipuro. *Sejarah Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwana VI, Pahlawan Kemerdekaan Republik Indonesia.* Surakarta: Sasana Pustaka, 1980.

Artikel Ilmiah

Meideri, Akhiyar, dan Lukman Yudho Prakoso. “Diponegoro War History in Total War Perspective in Supporting Strategies the National Defense.” *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)* 5, no. 4 (2021).

Narimo, Sabar. “Konsepsi Nilai-Nilai Pendidikan Humanis-Religius Menurut Pakoe Boewono IV (1788–1820) dalam Serat Wulang-Reh.” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (Desember 2014): 175–189.

Nugroho, Yusro Edy, Sahid Teguh Widodo, Wasino, dan Pardi. "Patriarchal Hegemony of Javanese Kings Power in Wulang Putri Text." *Cogent Arts & Humanities* 11, no. 1 (2024): 2335778. https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2335778.

Sukrismiyati, S. “Strategi Politik Pakubuwana VI Melawan Kolonial Belanda (Karaton Surakarta Hadiningrat).” *Jurnal CANDI* 12, no. 2 (2015).

Sukrismiyati, Tri Yuniyanto, dan Djono. “Strategi Politik Pakubuwana VI Melawan Kolonial Belanda Tahun 1823–1830.” *Jurnal CANDI* 12, no. 2 (Oktober 2015): 139–144.

Wiryawan, G. “Keraton Surakarta dan Legitimasi Politik Kolonial Pasca Perang Jawa.” *Paramita: Historical Studies Journal* 30, no. 1 (2020).

Sumber Khusus dan Dokumen Resmi

Naskah Perjanjian Pakubuwana VI dan Pangeran Diponegoro (1830).

Bêdhahipun Karaton Ngayogyakarta saha Kendhangipun PB VI.

Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 294 Tahun 1964, tanggal 17 November 1964.

© 2026 by the authors. **Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization** is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

https://doi.org/10.15642/qurthuba.2026.10.1.71-84